

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- _____, *Encyclopaedie van nederlandsch Indie*, 1977 hlm. 622
- Adi, Rianto, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum* Jakarta, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2021.
- Anggoro, Damas Dwi, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Cetakan Pertama, Malang, UB Press, 2017.
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Cet. 1, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010.
- Harsono, Boedi, *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Jilid Kedua, Cet. 12, Jakarta, Djambatan, 2008.
- Ismail, Tjip, *Pengaturan Pajak Daerah di Indonesia*, Jakarta, Departemen Keuangan Badan Pengkajian Ekonomi Keuangan dan Kerja Sama Internasional-Pusat Evaluasi Pajak dan Retribusi Daerah, 2005.
- Mardiasmo, *Perpajakan*, Edisi Revisi Tahun 2011, Yogyakarta, ANDI, 2011.
- Mustofa, *Tuntunan Pembuatan Akta-Akta PPAT*, Edisi Revisi, Yogyakarta, Karya Media, 2010.
- Nur Aini Setiawati, *Dari Tanah Sultan Menuju Tanah Rakyat: Pola Pemilikan, Penguasaan, dan Sengketa Tanah di Kota Yogyakarta Setelah Reorganisasi 1917*, Yogyakarta, STPN Press, 2011.

Perlindungan, A.P, *KOnversi Hak-Hak Atas Tanah*, Bandung, Mandar Maju, 1990.

Poerwokoesoemo, Soedarisman, *Kadipaten Pakualaman*, Yogyakarta, Gadjah Mada Unoversity Press, 1985.

Rosdiana, Haula, Edi Slamet Irianto, *Pengantar Ilmu Pajak (Kebijakan dan Implementasi di Indonesia)*, Jakarta, Rajawali Pers 2012.

Soemitro, Ronny Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1994.

Soekanto, *Sekitar Jogjakarta 1755-1825: Perdjanjian Gianti-Perang Diponegoro*, Djakarta, Mahabarata

Soekanto, Soerjono, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Rajawali Press, 1990.

Soemarsaid Moertono, *Negara dan Usaha Bina-Negara di Jawa Masa Lampau: Studi tentang Masa Mataram II, Abd XVI sampai XIX*, Jakarta, yayasan Obor Indonesia, 1985.

Sutedi, Adrian, *Hukum Pajak*, Cetakan Pertama, Jakarta, Sinar Grafika, 2011.

Waluyo, Bambang, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta, Sinar Grafika, 1991.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor

2043).

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049)

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5339)

Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6757)

Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria Nomor 2 Tahun 1962 tentang Penegasan Konversi dan Pendaftaran Berkas Hak-Hak Atas Tanah.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59 tahun 1997)

Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 1)

Peraturan Walikota Kota Yogyakarta Nomor 51 Tahun 2024 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah. (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2024 Nomor 51)

Jurnal

Sidik Machfud, *Optimalisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Meningkatkan Kemampuan Keuangan Daerah*, Makalah

disampaikan Acara Orasi Ilmiah, Bandung, 2002.

Kurniawan, Wahyu Andi, Setiowati, Theresia Supriyanti, “Ekspektasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Terhadap Faktor Sosial dan Ekonomi Bagi Masyarakat”, *Tunas Agraria*, 1, No. 1 (September 2018) <https://www.jurnaltunasagraria.stpn.ac.id/index.php/JTA/article/view/1/22>.

Sanjaya, I Made, I Putu Gede Seputra, Luh Putu Suryani, “Akibat Hukum Konversi Hak Atas Tanah Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.”, *Jurnal Analogi Hukum*, 3, No. 3 (2021) <https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/analogihukum>

Silalahi, Eka Wijaya, “Bea Perolahan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) atas Warisan, Apakah Wrisan (Dalam Garis Keturunan Sedarah) Harus dikenai BPHTB?”, *Jurnal Hukum & Pembangunan* 9, No. 4 (2019) https://scholarhub.ui.ac.id/cgi/viewcontent.cgi?params=/context/jhp/article/1210/&path_info=eka_wijaya_silalahi.pdf

Wicaksono, Dian Agung, Ananda Prima Yurista, Almonika Cindy Fatika Sari, “Kompatibilitas Pengaturan Pendaftaran Tanah Terhadap Kompleksitas Keadaan Hukum Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten”, *Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan*, Volume 6, No. 2 (2020): 172-187. <https://www.jurnalbhumi.stpn.ac.id/index.php/JB/article/view/411>

Internet

Perpustakaan Nasional Indonesia, “Cikal Bakal Keraton Yogyakarta”,
<https://www.kratonjogja.id/cikal-bakal/> (diakses pada 15
November 2024)

Direktorat Jendral Pajak “Hari Pajak dan Hak Rakyat untuk Berkontribusi”
<https://pajak.go.id/id/artikel/hari-pajak-dan-hak-rakyat-untuk-berkontribusi#:~:text=Pada%20butir%20kedua%20Pasal%2023,1945%20dan%20merupakan%20coretan%20perbaikan.> (diakses
pada 30 Agustus 2025)

Skripsi/Tesis/Disertasi

Attamimi, A. Hamid S., “Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara”, Disertasi, Universitas Indonesia, 1990.

Andan, Choirunnisa Aprilia, “Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Terhadap Tanah Kasultanan di Kelurahan Terban Kota Yogyakarta.” Skripsi, Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2020.

Pangestu, Robby, “Pengecualian Pengenaan BPHTB pada Peralihan Tanah Negara menjadi Tanah Kasultanan Ditinjau dari Prinsip Ekuitas”, Tesis, Magister Kenotariatan Universitas Gadjah Mada, 2023.